

No. 1 - Tahun 4 - 2007

ISSN 0216-5031

No. 1 - Year 4 - 2007



SENTRIS

ACADEMIC JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS STUDENT

"MDG Indonesia: Paradoks Idealita dan Realita"
Asmarwati Handoyo

"Kebangkitan Seni Kriya Batik: Antara Kesadaran Identitas Budaya dan Fenomena "Kembali ke Entitas"
Adeste Apriyanti

"Bangsa Thionghoa Indonesia Dalam Sebuah Konstruksi Sosial"
Alfan Amiruddin

"Esensi Peduli dalam Ruang Ekspresi (Menilik Efektivitas Iklan sebagai Kampanye Global Warming)"
Mufti Nuriatifah

"Global Warming: A Threat for Agricultural Country"
Muh. Ibrahim Ats-Tsauri

"Politik Air dan Masa Depan Gaia"
Fahd Pahdepie

"Indonesia Menjelang Perdagangan Bebas 2020"
Daniel Tumbur Muda Silalahi

"Saya, Malioboro dan Globalisasi"
Ratih Rachmawati

"Indonesia Ditengah Ketidakjelasan Perang Terhadap Terorisme"
Adi Mulia Pradana

"Demokrasi dan Kaitannya Dengan Terorisme di Indonesia"
Andriyansyah

**Kelompok Studi Mahasiswa
Pengkaji Masalah Internasional**

Student Study Group for
International Affairs

International Relations Student Association
International Relations Department | Faculty of Social & Political Sciences
Parahyangan Catholic University

ISSN 0216-5031

SENTRIS

ACADEMIC JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS STUDENT

Dewan Redaksi

Pelindung
Rektor Universitas Katolik Parahyangan
Dr. Cecilia Lauw Giok Swan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. Ulber A. Silalahi, MA.

Penasehat
Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.

Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional
Bonggas Adhi Chandra, S.IP., MA

Penanggungjawab
Presiden Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan
Ari Setiya Wibawa

Ketua HMPSHI Universitas Katolik Parahyangan
Mira Permatasari

Pengawas Pelaksana
Presiden KSMPMI
Ryan Adiputra R.

Redaksi

Pemimpin Redaksi I
Koordinator Divisi SENTRIS KSMPMI
Wulani Sriyuliani

Pemimpin Redaksi II
Koordinator Divisi SENTRIS KSMPMI
Sylvie Tanaga

Editor
Say Shio | Theodorus Albertus Agung D. P.

Sekretaris
Shyerly Anindia Hariyanto

Bendahara
Mekar Kusumaning Asih

Layout dan Desain
Rick Joseph H. P.

Distribusi
Bernadeta K. H. | Fajar Ajie Setiawan | Irene O.

Penerbit & Alamat Redaksi

Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciembuleuit 94 Bandung 40142
ksmpmi_unpar@yahoo.com
jumasentris_ksmpmi@yahoo.com



Penggandaan artikel dalam jurnal ini untuk keperluan pengajaran dan penelitian diijinkan dengan syarat menyebutkan sumber dengan jelas. Untuk tujuan lain harus mendapat ijin dari penerbit.

Jurnal Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional
JURNAL SENTRIS

Ide pembuatan jurnal pertama kali tercetus pada tahun 2004, baik oleh anggota maupun non-anggota KSMPMI, yang saat itu melihat kurangnya wadah menulis secara akademik, khususnya di kalangan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Hingga akhirnya, KSMPMI merealisasikannya melalui Jurnal Sentris ini. Dimana, mulai dari proses penulisan, redaksi, proses penerbitan hingga distribusi semuanya murni dilakukan oleh mahasiswa. Singkatnya, dengan berlandaskan pada *by the students, from the students and for the students*, kami berusaha untuk dapat selalu mempersembahkan karya-karya terbaik.

Kata SENTRIS sendiri dapat diartikan sebagai *pusat*, dengan harapan SENTRIS dapat menjadi pusat tersendiri, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin menyalurkan dan mengembangkan kemampuan menulisnya secara akademik. Namun, tidak sebatas itu, kami pun berharap agar SENTRIS dapat menjadi sarana mahasiswa Hubungan Internasional untuk dapat lebih memberdayakan dan mengembangkan potensi akademiknya.

Menjadi *pusat*, kami berharap tidak berarti lebih hebat, kami sadar bahwa hal tersebut diiringi oleh tanggungjawab yang sangat besar. Harapan untuk memberikan kontribusi yang terbaik tidak hanya untuk kami, seluruh civitas akademik, serta masyarakat secara umum. Berpegangan pada filosofi yang mengatakan bahwa, *with great power comes great responsibility*. Kami berharap agar SENTRIS dapat diterima dan memberi kesan mendalam di hati pembaca.

JURNAL SENTRIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan Ketua Jurusan	iv
Editorial	v
Artikel	
Esensi Peduli dalam Ruang Ekspresi: Menilik Efektivitas Iklan sebagai Kampanye Global Warming	1
Mufti Nurlatifah	
Bangsa Tionghoa Indonesia dalam Sebuah Konstruksi Sosial	6
Alfan Amiruddin	
Kebangkitan Seni Kriya Batik: Antara Kesadaran Identitas Budaya dan Fenomena “Kembali ke Etnisitas”	13
Adeste Adipriyanti	
Saya, Malioboro, dan Globalisasi	22
Ratih Rachmawati	
Indonesia Menjelang Perdagangan Bebas 2020	29
Daniel Tumbur Muda Silalahi	
MDG Indonesia: Paradoks Idealita dan Realita	
Menilik Kesiapan Indonesia Mencapai Millenium Development Goals 2015	35
Asmarawati Handoyo	
Politik Air dan Masa Depan Gaia	49
Fahd Pahdepie	
Global Warming: A Threat for Agricultural Country	52
Muhammad Ibrahim Ats-Tsauri	
Demokrasi dan Kaitannya dengan Terorisme di Indonesia	63
Daniel Tumbur Muda Silalahi	
Indonesia di Tengah Ketidakjelasan Perang terhadap Terorisme	69
Adi Mulia Pradana	
Keterangan Penulis	vii
Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional	ix
Susunan Kepengurusan Inti KSMPMI	xii
Ucapan Terima Kasih	xiii

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan anugerah-Nya jurnal Sentris kali ini dapat kembali terbit. Ucapan terima kasih khusus, juga tidak lupa saya tujukan kepada Bapak Ulbert A. Silalahi, selaku Dekan FISIP UNPAR, dan Bapak Yulius P. Hermawan, Ph.D selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional. Bagi rekan-rekan KSM PMI lainnya, salut atas kerja kerasnya dan kita harus tetap semangat berkarya, bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain.

Saya berharap Jurnal Sentris edisi berikutnya dapat terus terbit dan lebih mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, terutama sesama rekan mahasiswa HI-UNPAR, dan anggota KSM PMI; untuk lebih produktif, tidak malu-malu berkarya melalui tulisan. Karena di ujung pena yang dituangkan oleh buah pikiran kita sebagai akademisi, dapat menjadi sebuah *power* untuk dapat mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Bagi rekan-rekan yang telah berkontribusi tulisannya ke dalam jurnal ini, terima kasih atas keberaniannya berpartisipasi. Bagi rekan pembaca sekalian di manapun berada, khususnya almuni KSM PMI, kami sangat mengharapkan saran dan kritiknya yang membangun.

Selamat Menikmati bacaannya teman-teman sekalian!!!

God Bless and Viva KSM PMI always

Ryan Adiputra R.

Presiden KSM PMI 2007-2008

MDG Indonesia: Paradoks Idealita dan Realita Menilik Kesiapan Indonesia Mencapai Millenium Development Goals 2015

Asmarawati Handoyo

Interaksi dan kerjasama internasional bukan lagi sebagai sebuah kebutuhan tapi telah bermetamorfosa menjadi sebuah keharusan. Dalam kehidupan global sebuah negara tidak dapat mengisolasi diri jika tidak ingin terpinggirkan dari pergaulan internasional. Melalui berbagai aliansi strategis yang mengglobal telah melahirkan berbagai konsesus bersama yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dunia, melalui komitmen tiap negara untuk mewujudkan ketertiban dunia. Sekian kalinya konsensus internasional telah dicanangkan, dan untuk kesekian kalinya pula Indonesia ikut meratifikasinya. Salah satunya adalah komitmen Millenium Development Goals.

MDG dan Konsensus Internasional

Millenium Development Goals (MDG) atau yang akrab disebut sebagai Pembangunan Millenium merupakan agenda serius masyarakat dunia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dunia, konsensus ini diratifikasi oleh 147 negara anggota PBB yang bersepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium pada Millennium Summit, September 2000. Deklarasi Millenium dibangun atas kesadaran bersama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam menangani permasalahan utama dalam pembangunan yang meliputi delapan tujuan yang ingin dicapai. Delapan tujuan tersebut meliputi antara lain

penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan dengan menggunakan tahun 1990 sebagai titik awal. Tentu saja pencapaian MDG bukanlah hasil yang dapat diraih secara instan namun mensyaratkan komitmen serius pemerintah di tiap negara melalui upaya strategis terlebih bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam mencapai target 2015.

Agenda MDG kemudian dijadikan salah satu dasar pembangunan oleh pemerintah Indonesia yang di konkretkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan digunakan dalam agenda perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah. Setelah melalui separuh perjalanannya, bagaimanakah sebenarnya kesiapan dan upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk mencapai target di tahun 2015? Mampukah Indonesia menuntaskan target delapan capaian Millenium Development Goals?.

Antara Idealita dan Realita MDG Indonesia

Hakikatnya mensejahterakan rakyat baik itu penghapusan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa

merupakan tanggung jawab negara, namun kenyataannya peran ini tidak sepenuhnya mampu dijalankan dengan optimal oleh negara. Dengan membiarkan negara bekerja sendiri dan membiarkan kegagalan terus terjadi, tidak ubahnya sebagai tindakan apatisme terhadap nasib bangsa. Kekuatan *civil society* khususnya melalui pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan sebagai upaya mandiri mengangkat harkat dan martabat dirinya. Begitupula kemitraan dengan swasta diharapkan dapat meringankan beban negara dalam mengejar upaya pencapaian kesejahteraan rakyat di tahun 2015. Namun harapan memang tidak selalu sejalan dengan realita yang ada. Lalu bagaimanakah realita pencapaian Indonesia dalam memenuhi target setelah separuh perjalanan MDG?

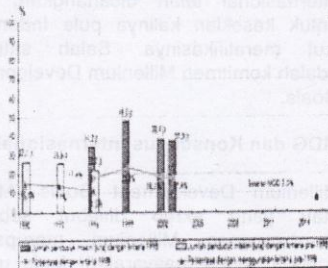
Paradoks Masyarakat Miskin di Negri Kaya

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan yang melimpah di darat maupun di laut. Baik dari sektor pertambangan, kehutanan, kelautan dan pertanian. Hanya saja kekayaan ini seolah menguap dan lebih banyak dinikmati segelintir elit dan pengusaha asing, sedang pribumi hanya menikmati 'nasi jatuh' saja bahkan mendapatkan dampak negative dari upaya eksploitasinya. Yang akhirnya terjadi adalah kesenjangan yang tajam tingkat kesejahteraan dalam stratifikasi masyarakat. Kemiskinan kemudian lahir dari *gap* distribusi kesejahteraan ini. Istilah kemiskinan pun memiliki indikator berbeda-beda. Untuk mengatakan masyarakat ada pada derajat kemiskinan BPS mecirikannya bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2100 kalori perhari perkapita. Sedangkan BAPPENAS menyebutkan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Di sadari atau tidak kemiskinan merupakan penghambat utama dalam pembangunan masyarakat. Padahal melalui keadaan miskin inilah seseorang akan kehilangan sebagian besar akses dasarnya untuk mendapat pelayanan publik yang berarti menjauhkannya dari derajat kesejahteraan.

Adapun dua target yang ingin dicapai dalam MDG mengenai kemiskinan antara lain menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah \$ 1 perhari dan menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan, menjadi setengahnya antara tahun 1990 – 2015. Data dari Susenas berikut ini menggambarkan dinamika jumlah penduduk miskin Indonesia dari tahun ketahun sejak tahun 1990 hingga prediksi angka kemiskinan di tahun 2015.

Gambar 1.1. Penduduk di bawah garis kemiskinan nasional



Sumber: Susenas

Dari gambar 1.1ⁱⁱ tersebut dapat diketahui adanya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, kecuali tahun 1999 disaat Indonesia dianda krisis ekonomi. Namun demikian dapat disimpulkan adanya keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Sehingga adanya asumsi positif bahwa bila keadaan eksternal *citeris paribus*,

maka di tahun 2015 optimisme pengurangan kemiskinan sesuai target MDG akan tercapai dari 27,1% di tahun 1990 menjadi 8% di tahun 2015. Namun harus diingat bahwa angka 8% dari 300 juta penduduk merupakan jumlah yang masih besar untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah sejahtera. Realitanya adalah vitalitas perekonomian Indonesia saat ini dalam keadaan yang stagnan. rupiah terus berada pada kisaran diatas Rp 9000,00, Indonesia masih terjerat beban hutang peninggalan rezim masa lalu sehingga APBN belum sepenuhnya dapat diprioritaskan untuk rencana pembangunan. Kebijakan bagi orang miskin pun seringkali terjadi penyimpangan di lapangan, seperti penyelewengan distribusi raskin. Tidak tepatnya muatan kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang tidak mendidik dan memandirikan masyarakat, ikut mewarnai dinamika berbagai usaha pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Disisi lain, dalam capaian penurunan penderita kelaparan menunjukkan fakta yang ironis yaitu terus naiknya prevalensi jumlah anak balita yang mengalami status gizi buruk di Indonesia. Pada tahun 2005 ditemukan 1,8 juta balita dengan status gizi buruk dan menjadi 2,3 juta pada tahun 2006. Sementara itu masih ada 5 juta lebih anak balita lainnya mengalami status gizi kurangⁱⁱⁱ. Perbandingan persentase kecukupan gizi antarwilayah di Indonesia juga masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi.

Pekerjaan Rumah Indonesia tidak terhenti hanya pada permasalahan ini, ada ancaman lain yang harus diupayakan penanganannya dengan serius pula oleh pemerintah yaitu bagaimana menangani rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2002 IPM Indonesia hanya sebesar 0,692, lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Thailand. Tak jauh berbeda, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia

pada tahun 2002 sebesar 0,178 lebih tinggi dari Philipina dan Thailand^{iv}. Oleh karena itu kondisi ini menjadi tantangan serius khususnya bagi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi isu kemiskinan dan pemiskinan.

Orang Miskin Dilarang Sekolah

Pendidikan merupakan aspek yang sangat mendasar yang diharapkan sebagai *problem solving* memutus rantai kemiskinan structural. Karena melalui konstruksi pendidikanlah, Indonesia menanamkan investasi masa depan untuk menjawab krisis ekonomi, sosial dan budaya bangsa. Pendidikan sejalan dengan tujuan kedua MDG yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak dimanapun, baik laki-laki maupun perempuan dapat meyelesaikan sekolah dasar (*primary schooling*).

Negara-negara maju telah banyak membuktikan bahwa melalui pendidikanlah kemajuan negara akan dicapai. Di saat Jepang mengalami kejadian luar biasa, hampir seluruh penduduknya tewas dalam bom Nagasaki dan Hiroshima, diluar dugaan yang ditanyakan pertama kali oleh kaisar Jepang saat itu adalah berapa jumlah guru yang masih hidup, sekarang kita dapat melihat bahwa Jepang yang mengalami porak-poranda di tahun 1945 bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu macan Asia meninggalkan jauh Indonesia. Jepang mampu membuktikan keberhasilannya dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.

Capaian keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan angka partisipasi dalam pendidikan, data Susenas 2004 menunjukkan, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI telah mengalami peningkatan dari 88,7 persen pada tahun

1992 menjadi sekitar 93 persen pada 2004. Sedangkan untuk jenjang SMP mengalami kenaikan dari 41,9 persen pada tahun 1992 menjadi 65,24 persen pada tahun 2004. Dari data tersebut pemerintah berhasil meningkatkan APM masyarakat, namun untuk mencapai angka 100% masih dirasa target yang jauh untuk bisa dicapai 2015^v.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah seperempat dari tujuan nasional seperti yang tertuang dalam empat tujuan Nasional di Pembukaan UUD 1945. Sehingga layaklah kiranya tuntutan terhadap seperempat APBN negara diprioritaskan untuk pendidikan. Sayangnya hingga saat ini belum adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk segera merealisasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan banyak hal yang harus ditempuh pemerintah mulai dari peningkatan kesejahteraan guru, membangun sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Ironis di era *ciber* sudah berkembang sangat cepat, Indonesia masih harus disibukkan dengan berbagai kenyataan pahit seperti masih tingginya tingkat buta aksara, sistem pendidikan yang seolah ikut dipolitisir selalu berubah seiring pengangkatan menteri pendidikan baru, di senayan legislator masih harus mengencangkan urat lehernya untuk tawar menawar anggaran pembangunan sekolah yang tinggal menunggu roboh. Belum lagi kebijakan sertifikasi, masalah anggaran untuk kesekian kalinya alasan gagalnya suatu kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan sertifikasi ini pemerintah paling tidak harus mengeluarkan 3,5 triliun rupiah perbulan seperti yang diamankan undang-undang padahal anggaran yang baru tersedia baru sekitar Rp. 400 miliar^{vi}. Celakanya kesiapan minimal tersebut tidak diinformasikan secara terbuka kepada guru dan cenderung manipulatif. Kebijakan sertifikasi guru akhirnya semakin menambah mimpi-mimpi malam para guru karena uang yang sedianya

memperbaiki kesejahteraannya belum juga turun di rekening pahlawan tanpa tanda jasa ini, atau mungkin lebih tepatnya yang lupa kita apresiasi jasanya.

Perbaikan pendidikan adalah tantangan mendasar dalam pembangunan di Indonesia khususnya sejak otonomi daerah. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat penting terlebih sejak lahirnya kebijakan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah akan menjadi motor terdepan bagi upaya perbaikan pendidikan nasional, sehingga belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk dalam hal penganggaran pendidikan harus segera di atasi.

Pendidikan Sadar Gender dan Empowerment Perempuan.

MDG ditahun 2015 menargetkan terjadinya penghapusan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Indonesia lambat laun telah mampu membuktikan perbaikan kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam pendidikan, terbukti dari perbaikan tingkat rasio partisipasi dan melek aksara penduduk perempuan terhadap laki-laki. Kesenjangan tingkat melek aksara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio angka melek aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki usia 15-24 tahun dari 97,9 persen pada tahun 1990 menjadi 99,7 persen pada tahun 2004. Apabila kelompok penduduk usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, maka tingkat kesenjangan tingkat melek aksara penduduk laki-laki dan perempuan menjadi semakin lebar dengan rasio melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 92,3 persen^{vii}. Pemerintah juga berupaya memperjuangkan perempuan untuk menduduki sekurang-

kurangnya 30% kursi di lembaga politik maupun dewan legislatif. Indonesia juga telah mencatat Megawati sebagai perempuan yang pernah menjadi orang nomor satu dalam sejarah kepresidenan Indonesia.

Namun di lain tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan Indonesia seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap masih terjadi. Apalagi didukung dengan lemahnya perlindungan hukum bagi korban disertai lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, terutama di tingkat kabupaten/kota. Hal ini menjadi tuntutan besar bagi penciptaan keadilan gender. Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah belum adanya kesadaran berkeadilan dalam gender serta upaya pemberdayaan perempuan. Dan melalui pendidikan kepada perempuanlah salah satu jalan yang akan memberikan kesadaran gender ini dapat dikonstruksikan, tidak hanya kepada perempuan tapi juga bagi laki-laki. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah akan menjadi sia-sia, apabila perempuan sendiri tidak memiliki kemauan dari dalam dirinya untuk memberdayakan dan meningkatkan perannya sebagai perempuan. Karena pada dasarnya saat banyak perempuan terdidik dengan baik, mereka akan memahami keadilan gender dan hak-haknya sebagai perempuan dan otomatis kematian anak dan ibu hamil, kekurangan gizi, tingkat pendidikan keluarga akan menjadi lebih baik. Dengan memberikan akses bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan diharapkan kebijakan yang akan dilahirkan akan lebih ramah dan memaanami perempuan. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengangkat harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari tulang punggung bangsa.

Kematian Anak dan Kesehatan Ibu

Tujuan keempat dan kelima MDG adalah menurunkan Angka kematian anak dan kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga-perempatnya. Capaian Indonesia dalam tujuan ini dapat dikatakan berhasil. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 menunjukkan terjadinya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) hingga mencapai 46 per 1.000 kelahiran hidup pada periode 1998-2002. Walaupun begitu, angka kematian bayi ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand. Variasi kematian bayi antar propinsi juga masih cukup besar, dengan tingkat kematian paling tinggi terjadi di Nusa Tenggara Barat. Begitupula disparitas kematian ibu antar wilayah di Indonesia masih cukup besar dan masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, dimana resiko kematian ibu karena melahirkan di Indonesia adalah 1 dari 65, dibandingkan dengan 1 dari 1.100 di Thailand^{viii}.

Adapun penyebab utama tingginya angka kematian anak dan ibu hamil sebagian besar disebabkan karena tiga hal yaitu terbatasnya akses terhadap pelayanan karena kendala biaya (*cost barrier*) terutama bagi masyarakat miskin, karakteristik geografis Indonesia yang mempersulit terhadap akses kesehatan dan sarana transportasi yang terbatas khususnya untuk menjangkau daerah terpencil. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah salah satunya yaitu menetapkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Dengan sistem ini, sekitar 36,1 juta penduduk miskin dapat memanfaatkan pelayanan di puskesmas dan jaringannya seperti puskesmas pembantu dan bidan di desa,

serta pelayanan di kelas III rumah sakit secara gratis^{ix}.

Desentralisasi bidang kesehatan pada saat ini masih belum secara jelas mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Keberlanjutan peran BKKBN dan KB, penanganan kasus gizi buruk, kesehatan ibu hamil mensyaratkan peran pemerintah daerah yang lebih besar dalam menangani kasus ini. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah bidan di desa telah menurun yang akan berakibat pada sulitnya kelompok miskin untuk mendapatkan pertolongan persalinan. Selain itu, keterbatasan kemampuan finansial rumah tangga juga telah menghambat akses ke pelayanan dasar dan memenuhi kecukupan gizi. Oleh karenanya, inovasi mekanisme yang meringankan beban keuangan rumah tangga sangat diperlukan untuk menjamin akses mereka kepada pelayanan. Terutama dalam perbaikan ekonomi rumah tangga. Dengan jumlah penduduk miskin Indonesia yang masih tinggi di tahun 2015, niscaya target penurunan tingkat kematian bayi dan pemenuhan kesehatan bagi ibu akan tetap sulit di capai.

HIV/AIDS dan Ancaman Epidemik Penyakit Berbahaya

Tujuan keenam MDG adalah perang melawan HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya. Prevalensi ancaman epidemik HIV/AIDS di Indonesia terus mengalami peningkatan, padahal di beberapa negaralain seperti Thailand mampu menurunkan kasus HIV/AIDS. Di tahun 2003 angka Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) diperkirakan ada 90.000 – 130.000 dan pada tahun 2010 diasumsikan akan ada sekitar 110.000 orang yang menderita atau meninggal karena AIDS, serta 1 – 5 juta orang yang mengidap virus HIV^x. Data ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS telah menjadi ancaman serius bagi Indonesia.

Pola penyebarannya mayoritas dari pengguna NAPZA dan seks bebas tanpa menggunakan kondom. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan pemahaman akan hak-hak reproduksi, pengobatan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan surveilans. Upaya pencegahan juga perlu ditujukan kepada populasi berisiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik serta pekerja kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV/AIDS. Namun tindakan kuratif saja tidak akan optimal apabila tidak ada upaya jangka panjang mencegah sumber munculnya HIV/AIDS. Pemerintah perlu melakukan upaya penertiban bagi daerah-daerah seks komersial, pendidikan seks aman dan setia pada pasangan serta pemberantasan narkoba. Dengan penanganan yang bersumber dari penyebabnya langsung, pemerintah tidak hanya akan menurunkan penyebaran HIV/AIDS namun juga menyelamatkan moral dan generasi masa depan.

Adapun Perda No .15 Tahun 2002 tentang Tindak Pelanggaran Prostitusi, yang mengatur hukuman bagi pekerja seks komersial dan laki-laki hidung belang belum mampu membuat jera. Perda ini cenderung kurang berjalan dan tidak adanya ketegasan, baik dari pemerintah daerah maupun dinas yang terkait. Kalcupun diadakan operasi bersama untuk merazia, belum dapat dikatakan efektif dan selama ini operasi belum menyentuh akar persoalan. Adapun kegiatan penertiban tidak mampu memberikan sanksi berat kepada mucikari atau organizer tempat-tempat hiburan^{xi}. Dengan demikian, kalau kita megevaluasi kegiatan penertiban selama ini lebih bersifat tidak rutin dan sementara. Bagi pelaku hanya dikenakan sanksi sidang di tempat dan kalupun ingin bebas bersyarat, dapat

membayar denda uang yang besarnya tidak lebih dari Rp150 ribu/orang. Sedangkan untuk target pengendalian penyebaran malaria, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penderita melalui berbagai program. Program tersebut antara lain melalui pendekatan *Roll Back Malaria* (RBM) yang dioperasionalkan dalam Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria sejak tahun 2000. Indonesia yang tercatat sebagai negara penyumbang kasus tuberkulosis terbesar ketiga di dunia, dengan sekitar 582.000 kasus baru setiap tahun, akhirnya di tahun 2003 berhasil mencapai angka kesembuhan sebesar 86,7 persen^{xii}. Untuk mencapai pada angka kesembuhan 100% perlunya dilakukan upaya yang serius dari pemerintah dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan perbaikan kapasitas petugas kesehatan.

Lingkungan dan Paradigma Anthroposentrisme

Mengenai aspek lingkungan hidup MDG menerapkan tiga target antara lain yaitu menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang bersinergi dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya yang hilang. Paradoks sekali dengan kebijakan pemerintah saat ini. Indonesia bahkan dinilai sebagai pemegang rekor *deforestasi*-kerusakan hutan. Indonesia memiliki angka tertinggi di dunia dalam kerusakan hutannya, yaitu 1,8 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya. Menurut FAO, Indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, dimana setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam^{xiii}.

Fakta tersebut menunjukkan gagalnya pemerintah dalam mencegah *illegal logging* dan mempertahankan daerah konservasi. Belum selesai masalah *illegal logging*, pemerintah secara mengagetkan mengeluarkan PP No. 2 tahun 2008. Melalui PP ini

memungkinkan perusahaan tambang untuk mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar sewa Rp. 1,8 juta hingga Rp. 3 juta per hektarnya. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repeter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol. Harganya turun menjadi Rp. 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. Atau sama saja dengan Rp. 120 – Rp. 300 per meternya^{xiv}. Protes publik terhadap PP No. 2 tahun 2008 ini sayangnya tidak menjadikan presiden menolak membatalkan PP tersebut, dan berkilah bahwa putusan tersebut adalah warisan pemerintahan masa lalu. PP ini akan beresiko melahirkan kerusakan lingkungan yang lebih serius ke depan. Pemerintahan berikutnya dan rakyat sekitar tambang akan menanggung biaya konflik sosial dan pemulihan lingkungan sekitar pertambangan begitu perusahaan tutup.

Ini semakin menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk secara serius melindungi keberadaan hutan dan lebih berpihak pada kapitalis, padahal isu *Global Warming* semakin mengancam keberlangsungan alam. Hal ini membuktikan paradigma Anthroposentrime ternyata juga telah digunakan pemerintah untuk mengeksploitasi alam.

Menurut Arne Naess, krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal^{xv}. Dari sini dapat disimpulkan bahwa krisis lingkungan global yang dialami selama ini sebenarnya bersumber pada kesalahan cara pandang interpretasi manusia terhadap dirinya dan alam yang mendasari lahirnya kekeliruan perilaku terhadap alam. Manusia berparadigma *Antroposentrime* memiliki interpretasi

bahwa nilai tertinggi terletak pada manusia dan kepentingannya, segala sesuatu yang ada di alam ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang kepentingan manusia. Dengan cara pandang *antroposentrisme* seperti inilah yang akhirnya memunculkan perilaku manusia yang miskin etika dalam memanfaatkan lingkungan, eksploitasi yang dilakukan terhadap alam diusahakan bagi pemenuhan kepentingan dan pengumpulan kapital semata.

Mengenai pemenuhan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan fasilitas sanitasi dan pemukiman kumuh, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang cukup signifikan terutama terkait dengan perbaikan sanitasi telah terjadi peningkatan aksesibilitas rumah tangga terhadap sarana jamban yaitu dari 63,5% pada tahun 2002 menjadi 67,1 % pada tahun 2004. Sedangkan akses air minum Indonesia pada tahun 2002 baru mencapai 50 persen dan pada tahun 2004 terjadi peningkatan akses menjadi sekitar 53,4 persen. Namun untuk pemukiman masih ditemui sekitar 17 persen atau setidaknya 8,8 juta dari 52 juta rumah tangga yang belum memiliki atau masih menyewa rumah, dan sebagian besar berada di perkotaan. Kecenderungan tersebut tidak berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir^{Xvi}.

Untuk menangani masalah sanitasi dan pemukiman pemerintah perlu melakukan kebijakan pembangunan yang mengupayakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan peran serta seluruh stakeholder terutama pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum, sanitasi dan pemukiman semisal rusunawa yang berbasis pada partisipasi masyarakat maupun melibatkan peran serta swasta dalam penyediannya.

Aliansi Global dan Jerat Hutang

Seberapa pentingkah kemitraan global dilakukan? Berinteraksi secara global tidak dapat dilepaskan dalam pencapaian tujuan MDG sebagaimana dasarnya MDG diawali sebagai konsensus internasional. Melalui dukungan dan kemitraan dengan negara-negara maju diharapkan akan adanya kemudahan dalam mencapai delapan target MDG. Kemitraan ini ditujukan dalam aspek bantuan pembangunan global, utang luar negeri, perdagangan, *environmental sustainability*, pertumbuhan investasi dan transfer teknologi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kerjasama internasional ini akan memudahkan Indonesia atau bahkan sebaliknya akan semakin mempersulit pembangunan Indonesia?.

Sampai dengan Maret 2005 total utang luar negeri pemerintah Indonesia adalah US\$ 67,12 Miliar^{Xvii}. Besarnya utang luar negeri pada saat ini semakin menuntut pemerintah untuk lebih selektif dan hati-hati dalam pengelolaannya. Kemitraan melalui bantuan pembangunan global semisal hutang, bisa jadi merupakan lubang jebakan baru bagi Indonesia. Dengan beban hutang baru, seolah menggali lubang tutup lubang, yang akan dibebankan pada generasi kedepan. Akibatnya Indonesia tidak akan pernah merdeka dari hutang sebagai apologi dari proses pembangunan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh pemerintah adalah bagaimana mengupayakan penghapusan hutang/ *debt swap for MDG* akhirnya dapat disetujui. Tidak hanya itu Indonesia harus mulai berupaya bebas dari hutang, dengan lebih mengoptimalkan hasil alamnya terutama kebijakan sektor tambang dan mendistribusikannya secara adil sebagai pendapatan negara bagi pembiayaan pembangunan.

Peluang dan Tantangan Kesiapan Indonesia menghadapi MDG.

Dalam memenuhi target Millineum Development Goals tentunya diperlukan kesiapan yang matang terkait kondisi internal negara yang bersangkutan, begitupula Indonesia. Menilik dari kesiapan internal Indonesia mencapai target MDG inilah yang akan mencirikan capaian keberhasilan Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2015 nanti. Sehingga dapat diprediksikan apakah nantinya akan menjadi potensi yang mendukung ataukah yang menghambat pencapaian tujuan MDG. Berdasarkan capaian setengah perjalanan MDG Indonesia dan fakta-fakta yang melatarbelakangi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi peluang maupun tantangan bagi Indonesia. Adapun Peluang dan Tantangan yang perlu diwaspadai dalam mencapai target MDG 2015 antara lain:

Indonesia Jawara KKN.

Menurut studi Bank Dunia, korupsi dilakukan pada level individu, bisnis, dan politik. Sebagai contoh, sebanyak 63% responden korupsi terjadi karena kesulitan masyarakat untuk mendekati sistem hukum yang rumit dan mahal. (Kompas, Minggu, 25 Februari 2007). Di level bisnis dan politik, suap diperlukan untuk memangkas proses hukum dan birokrasi yang panjang, lama, dan berbelit-belit. Selain itu, korupsi juga terjadi di sektor kepolisian, pembangunan infrastruktur, keperluan publik, administrasi pertanahan, pajak, pabean, bahkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Predikat Indonesia sebagai salah satu negara terkorup bukan lagi sebagai hal yang mengejutkan. Bagaimana tidak *Transparency International* (IT) Indonesia, menunjukkan tidak adanya perbaikan yang signifikan terhadap

indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia hanya mengalami sedikit kenaikan dari 2,2 pada tahun 2005 menjadi 2,4 pada tahun 2006. Dengan IPK 2,4 Indonesia berada pada ranking 130 dari 163 negara yang disurvei. Walaupun ada sedikit peningkatan, namun posisi IPK di bawah 3 dinilai sangat memprihatinkan, terebih jika dibandingkan dengan IPK negara-negara Asia lainnya seperti Singapura (9,4), Jepang (7,6), Malaysia (5,0), Thailand (3,6), China (3,3), dan Filipina (2,5). Tahun-tahun sebelumnya Indonesia hanya lebih baik dari Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Myanmar^{xviii}.

Sejauh apakah keadaan korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia? Menurut Koalisi Nasional LSM Anti Korupsi (Jawa Pos Selasa, 30 Januari 2007)^{xix} mencatat, berdasarkan data 15 Lembaga Pemantau korupsi dari berbagai daerah tercatat bahwa selama tahun 2004-2006, sedikitnya penanganan 246 kasus korupsi tidak jelas. Kepolisian dan kejaksaan sengaja menunda-nunda proses hukum tanpa ada batas akhir penyelesaian, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Fakta lain masih terlihat adanya indikasi kuat bahwa penanganan kasus korupsi diwarnai praktik korupsi pula sebagai upaya membebaskan diri dari jeratan hukum. Adanya dukungan biaya operasional bagi kejaksaan dan kepolisian dari pemerintah daerah tentu saja akan berpengaruh pada independensi aparat penegak hukum dalam menangani korupsi. Di sisi lain tidak adanya ketebukaan bagi masyarakat untuk memperoleh laporan dari kejaksaan dan kepolisian atas kemajuan penanganan korupsi, melemahkan posisi masyarakat untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus korupsi dan mengawasi badan pemberantasan korupsi. Hal ini menggambarkan bahwa masih lemahnya kepastian hukum terhadap perkara korupsi di Indonesia.

Korupsi sebagai pembunuh laten kini seolah seperti candu yang membuat pelakunya semakin ketagihan untuk melakukannya kembali. Dengan korupsi masyarakat dimiskinkan, dibodohkan, dibunuh pelan-pelan, dan alam dieksploitasi sesuka hati. Dengan korupsi rakyat kehilangan hak-haknya, kesulitan dalam mengakses pelayanan publik sehingga tidak pernah mengentaskan mereka dari pemiskinan dan kemiskinan struktural. Upaya pemberantasan korupsi memang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat namun perlu adanya langkah yang holistik baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Tentu saja kita berharap implementasinya tidak hanya di atas kertas sehingga diharapkan memiliki *power* dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain kondisi yang ada menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum belum sepenuhnya dapat dibanggakan, bagaimana tidak satu bukti terakhir dengan penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan dengan tuduhan suap senilai 660.000 dollar Amerika Serikat semakin membuktikan rendahnya kredibilitas penegak hukum di Indonesia. Jika bukan kepada hukum kepada siapa lagi masyarakat dapat mempercayakan keadilan dan pemberantasan korupsi?

Jika ingin belajar dari Negara tetangga semisal Cina, ketegasan hukum merupakan salah satu wasilah yang signifikan, tidak tanggung-tanggung koruptor dijatuhi hukuman mati dapat menjadi *shock therapy* tiap orang untuk berfikir ulang jika berniat melakukan korupsi. Selain itu perlu adanya integrasi seluruh pihak baik pemerintah maupun *civil society* dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi. Adapun beberapa langkah yang ditawarkan oleh Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) mungkin dapat diadopsi sebagai langkah strategis upaya pemberantasan korupsi akut di

Indonesia antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut^{XX}:

1. Undang-undang Perlindungan Hukum terhadap *Whistle Blowers*.

Perlu adanya perlindungan dan penghargaan kepada pelapor atas informasi praktek KKN. Selama ini, kedudukan pelapor sebagai sumber informasi praktik KKN sangat lemah, bahkan banyak diantaranya yang kemudian justru mengalami nasib buruk. Perlindungan yang nyata akan mendorong seluruh elemen masyarakat dan korban praktek KKN berani untuk mencegah dan mengheretikan KKN.

2. Sistem Insentif dalam penegakan hukum.

Untuk melaksanakan sistem ini perlu dibentuk komite independen yang bertugas menilai kinerja jaksa dan hakim dalam menangani kasus-kasus KKN. Komite bertugas memberikan penilaian dan rekomendasi tindakan kepada pemerintah terhadap tindakan jaksa dan hakim yang dicurigai mengandung unsur KKN dan menyampaikannya ke publik. Tidak hanya itu, perbaikan kesejahteraan hakim dan jaksa perlu segera dilakukan baik kejiwaan maupun keuangan. Insentif ini dapat diberikan kepada jaksa yang tindakannya mampu menyelamatkan uang negara. Sebagian kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dapat diberikan kepada mereka.

3. Membentuk komite anti korupsi di daerah

Komite ini perlu dibentuk karena melihat semakin meluasnya praktik KKN di daerah, terutama sejak otonomi daerah. Pemerintah pusat perlu mewajibkan semua pemerintah daerah untuk membentuk Komite anti korupsi ini dengan berkaca melalui kelemahan-kelamahan yang ada pada badan yang selama ini telah ada.

4. Akuntabilitas DPRD kepada rakyat dan pemilihnya.

Perlu dibuatnya *code of conduct* anggota DPRD/D agar masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap perilaku

wakil rakyat, sehingga masyarakat dapat melakukan *class action* apabila kemudian ditemui tindakan-tindakan DPR/D sebagai representasi dirasa merugikan masyarakat luas.

5. Pemberian sanksi moral.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai pelaku KKN dan telah memiliki kekuatan hukum perlu diberikan sanksi moral dan politik yang tegas. Para pejabat publik yang terbukti melakukan praktik korupsi, misalnya harus dilarang menduduki jabatan publik, baik di birokrasi maupun di lembaga politik.

6. Reformulasi konsep *Civic Education*.

Pendidikan adalah sarana paling tepat membangun pemahaman kepada penerus bangsa terhadap suatu nilai. Oleh karena itu perlu adanya serangkaian program *new civic education*, pelembagaan sikap dan nilai-nilai anti KKN yang diterapkan sejak dini di bangku sekolah melalui sistem kurikulum. Melalui pendidikan ini tidak sekedar dibangun kesadaran bela negara saja namun juga dibangun kesadaran akan bahaya praktek KKN sebagai *cammon enemy* bagi kelangsungan hidup bangsa.

Selama mengguritanya tindakan korupsi di seluruh level pemerintahan dan di seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak dapat segera dikendalikan maka akan semakin banyak harta kekayaan negara yang tidak terdistribusikan dengan adil terutama bagi orang miskin. Upaya pencapaian delapan tujuan MDG pun tidak bisa tidak harus segera dibarengi dengan upaya pemberantasan korupsi secara radikal untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Involusi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Selain tindak korupsi, kegagalan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan MDG juga disebabkan karena belum konsistennya pelaksanaan otonomi dan

desentralisasi. Seiring bergulirnya UU no. 22 tahun 1999 mentransformasikan Indonesia dari pemerintahan yang sentralistis menuju negara yang terdesentralisasi. Kebijakan sentralistis yang cenderung *uniformitas* menafikkan karakteristik masing-masing daerah disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu munculnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat dan menentukan program yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Melalui UU otonomi daerah tersebut, dilakukan pelimpahan kewenangan dari pusat kepada kabupaten dan kota meliputi seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat dan propinsi, termasuk pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, petanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi dan tenaga kerja^{xxi}. Kabupaten dan kota memiliki peran terdepan dalam memberikan pelayanan publik dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dengan otonomi dan desentralisasi diharapkan akan lebih mendekatkan masyarakat terhadap akses pelayanan dan proses pengambilan keputusan melalui proses partisipasi masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Melalui keluasan kewenangan kepada daerah, diharapkan dapat memaksimalkan upaya-upaya pembangunan termasuk pencapaian delapan sasaran MDG sehingga lebih terfokus dan efektif karena pelayanan untuk pencapaian delapan indikator lebih dekat dan responsif kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya diperlukan

adanya komitmen dan *political will* terutama dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan praktik pelayanan publiknya.

Yang disayangkan adalah telah terjadi *miss* interpretasi kebanyakan *stakeholders* terhadap otonomi daerah yang akhirnya mendistorsi tujuan utamanya. Otonomi daerah diinterpretasikan para elit sebagai wasilah pemenuhan kepentingan politik dan kekuasaan semata. Elit politik lebih sibuk urusan politik dan administrasi, lebih fokus memaksimalkan PAD yang semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Muncul berbagai isu sentral terkait pelaksanaan otonomi daerah. Menguatnya fanatisme daerah mulai muncul ke permukaan, isu putra daerah kerap muncul dalam setiap pemilihan kepala daerah. Demikian juga isu aset daerah merupakan politik baru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal. *Grey area* kewenangan antara pusat dan daerah menjadikan tidak adanya kejelasan penyerahan beban pelayanan publik bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab. Ketidakpuasan atas pembagian sumber keuangan terutama terhadap bagi hasil SDA akhirnya mengancam integrasi bangsa, seperti yang terjadi di Aceh, Riau, Kaltim dan Papua. Bahkan saat kewenangan yang amat besar di daerah tanpa diimbangi dengan menguatnya kapasitas masyarakat sipil hanya akan semakin memperluas praktik KKN, memunculkan "raja-raja kecil" di daerah dan semakin merugikan kepentingan publik. Sehingga pelayanan berkualitas dan kesejahteraan publik semakin jauh dari panggung, dan capaian MDG hanya tinggal jargon semata.

Quo Vadis Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan garis terdepan bagi pemberian pelayanan kepada publik. Melalui *street level bureaucrat* inilah kepercayaan masyarakat kepada negara dipertaruhkan. Kebijakan kinerja

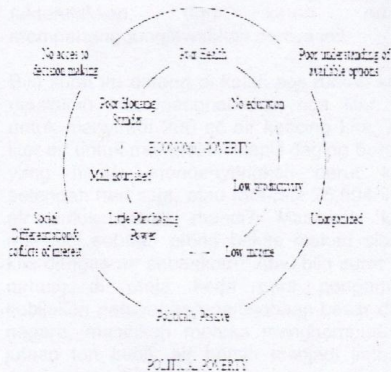
birokrasi berimplikasi pada kehidupan politik dan ekonomi. Menilik era orde baru, birokrasi lebih difokuskan pada pencapaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi tapi lupa membangun penguatan terhadap institusi publik yang berperan dalam distribusi pelayanan secara efektif dan efisien. Bahkan dimasa ini birokrasi lebih digunakan sebagai alat penguasa dalam menyokong rezim otoritarian orde baru. Pemerintah cenderung represif dan alergi terhadap transparansi disertai lemahnya sistem kontrol melemahkan kredibilitas berbagai institusi strategis. Belum lagi munculnya para *birokrat komprador* yang bersengkokol dengan kapitalis semakin menjauhkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Tak pelak kemudian muncul kesenjangan pelayanan publik. Akibatnya pedapatan perkapita yang tinggi tidak mampu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sejak bergulirnya era reformasi maka metamorfosa birokrasi yang perlu dilakukan paling mendasar adalah memurnikan kembali peran birokrasi dari paradigma *pamong praja* yang berorientasi pada kekuasaan menjadi *pengreh praja* yang berorientasi sebagai pelayan publik. Realitanya kini, birokrasi belum mampu membuktikan perubahan ke arah yang lebih baik. Birokrasi Indonesia juga berimplikasi pada tatanan perekonomian. Birokrasi yang rumit berakibat hengkangnya investor asing yang diikuti semakin meningkatkan angka pengangguran. Bukan soal yang mengejutkan, bagaimana tidak jika untuk mendapat perijinan saja pengusaha harus melewati 12 prosedur dalam waktu 151 hari dan menghabiskan \$ 1.163,31 dollar, dibandingkan dengan Australia yang hanya melewati 2 prosedur dalam waktu 7 hari dengan biaya hanya \$ 600,02 dollar^{xxii}. Rumitnya birokrasi menimbulkan dampak yang amat luar biasa. Disaat pathologi birokrasi serupa pungli dan diskriminasi belum benar-benar terhapus dan pelayanan publik di

kantor-kantor instansi pemerintah yang tidak segera terobati maka niscaya Indonesia akan semakin jauh dari pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlunya percepatan reformasi birokrasi sebagai langkah percepatan perbaikan pelayanan publik yang berimbang pada capaian target MDG 2015 perlu segera dilakukan.

Memutus Rantai Kemiskinan Struktural

Seperti yang diungkapkan oleh Sosiolog besar Martinussen, mengenai kemiskinan struktural. Martinussen mengatakan bahwa kemiskinan muncul karena adanya lingkaran setan kemiskinan yang berkaitan satu sama lain. Selama satu sebab kemiskinan tidak dapat diputus maka sebab lain pun tidak dapat diatasi. Martinussen mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan dan menyebabkan *trickle down effect* pada *Economic Poverty* dan *Political Poverty*.



Gambar 2. The Vicious Circles of Economics and Political Poverty. (Martinussen, 1997) xxiii

Berdasarkan gambar *Vicious Circle* Martinussen tersebut Indonesia dapat mengambil satu fokus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan struktural yaitu melalui aspek pendidikan.

Mengapa pendidikan, hal ini karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan membangun manusia yang memiliki harkat dan martabat sehingga memiliki kemandirian dan kesadaran untuk hidup lebih baik, sehingga masyarakat akan berusaha membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, kekurangan gizi, kesadaran budaya hidup sehat, mengelola alamnya dan memiliki kepercayaan diri *think globally act locally* berinteraksi dalam komunitas internasional.

Terlepas dari program MDG, pemerintah Indonesia selama ini pun telah sering memiliki berbagai target namun seringkali menampakkan hasil yang mengecewakan. Dengan menilik berbagai faktor di atas seperti ancaman KKN, involusi kebijakan otonomi daerah dandesentralisasi, keberlangsungan reformasi birokrasi dan menjadikan pendidikan sebagai fokus pemutus rantai kemiskinan struktural, diharapkan dapat menjawab tantangan apa yang harus diwaspadai dan peluang apa yang harus dioptimalkan kemanfaatannya dalam mencapai target—target MDG. Jika peluang dan tantangan ini tidak mampu dikelola dengan baik, maka target-target akan bermetamorf menjadi sekedar utopi masa depan dan menjadikan fatamorgana bagi masyarakat yang telah lama memimpikan kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang kaya namun kesalahan yang terjadi pada Indonesia tak ubahnya seperti apa yang disampaikan oleh Peter Drucker: *“There is never underdeveloped country, there is always undermanaged country”*. Realitas Indonesia menjadi negara terbelakang bukan karena negara ini miskin atau tidak adanya SDM yang berkualitas hanya saja negara ini mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga lebih layak jika disebut sebagai “Negara Salah Urus”. Jangan sampai dengan manajemen salah urus ini, menjadikan Indonesia kembali hanya bisa bertarget dalam Millenium Development Goals dan menjadikan

capaian delapan target MDG semakin utopis.

Referensi

Draf Ringkasan - *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*. Per 25 Agustus 2005.

Keraf, A. Sonny. 2005. *Etika Lingkungan*. Kompas: Jakarta.

Maarif, Syafii A., dkk. 2007. "Memaknai Pendidikan Untuk Semua, Memprioritaskan Pendidikan Untuk Kaum Miskin" dalam "Islam. Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan". Maarif Institute for Culture and Humanity: Jakarta.

Meika, Amelia. 2007 *Bahan ajar Problematika Kemiskinan Dunia Ketiga*. Jurusan Sosiologi, FISIPOL UGM.

Mudrajad Kuncoro. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. *Policy Brief*. No.10/PB/2003.

Ratminto. 2007. *Bahan ajar kuliah (RPKPS) Pembangunan Industri*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM.

Samhadi dalam Nitta. 2007. *Bahan ajar Jurusan Gizi*. Fakultas Kedokteran UGM. Subarsono, Agus. *Bahan Ajar Kuliah (RPKPS) Teori Pembangunan*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM.

website

www.freelists.org

www.jatam.org

www.sarwono.net

www.suaramerdeka.com

www.suarakarya-online.com

<http://insidewinme.blogspot.com/2008/02/kajian-tentang-korupsi-indonesia.html>